

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif untuk mencari pekerjaan.³¹ Pengaruhnya yang secara langsung terhadap standar kehidupan, menjadikan pengangguran sebagai masalah kompleks dalam perekonomian secara makro.³² Selama ini, pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang sangat menentukan kesejahteraan ataupun kemakmuran masyarakat. Sedangkan pendapatan sendiri akan tercapai secara maksimum ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat direalisasikan. Secara langsung, pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Sehingga, hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahtraannya. Bisa dikatakan, ketika seseorang menganggur maka pengeluaran untuk konsumsinya juga semakin kecil, sehingga hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangganya. Dan dalam jangka waktu yang panjang, pengangguran akan menimbulkan permasalahan besar dalam kehidupan sosial politik dalam suatu negara.³³

³¹ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik...*, hal. 120

³² Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hal. 197

³³ *Ibid.*, hal. 198

Dalam standar internasional, pengangguran adalah seseorang yang telah digolongkan sebagai angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, akan tetapi pekerjaan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Angkatan kerja sendiri yakni meliputi sekumpulan orang dewasa yang mencari pekerjaan ataupun sedang bekerja. Jadi, angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan masyarakat yang sudah mampu menghasilkan barang dan jasa (golongan yang bekerja) dan golongan yang siap bekerja dan mencari pekerjaan (golongan menganggur).³⁴

Masalah pengangguran merupakan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi para ahli ekonom untuk dikaji ulang. Karena, pembahasan mengenai pasar tenaga kerja, pendapatan nasional, serta pertumbuhan ekonomi sering diasumsikan jika perekonomian sedang berada dalam kesempatan kerja penuh (*full employment*). Akan tetapi, pada kenyataannya tidak setiap individu atau masyarakat berada dalam angkatan kerja yang selalu beruntung memperoleh pekerjaan.³⁵

Pengangguran merupakan masalah global mengenai ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara. Besar atau kecilnya angka pengangguran menjadi cerminan baik atau buruknya perekonomian dalam suatu negara. Namun, kebijakan dalam

³⁴ Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hal. 23

³⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hal. 198

memecahkan permasalahan seperti pengangguran harus berdasarkan pada penyebab dan jenis pengangguran yang dialami suatu negara tersebut.³⁶

2. Faktor-faktor Penyebab Pengangguran

Pada dasarnya, pengangguran merupakan permasalahan besar yang tidak dikehendaki adanya dalam setiap negara. Akan tetapi, dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah pengangguran semakin menjalar. Dalam melakukan kebijakan untuk memecahkan permasalahan seperti pengangguran harus berdasarkan pada penyebabnya. Adapun beberapa faktor penyebab pengangguran adalah sebagai berikut:³⁷

a. Jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas

Di Indonesia sendiri, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Sehingga, hal ini mengakibatkan para pencari kerja sulit untuk mencari pekerjaan dan terpaksa untuk menganggur.

b. Sumber daya manusia atau para pencari kerja yang kurang terampil

Dalam mencari pekerjaan, seseorang harus berpengalaman serta didukung dengan keterampilan yang ia miliki. Karena, setiap perusahaan atau badan usaha membutuhkan angkatan kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi untuk menunjang produktifitas kerja dan hasil produksi yang maksimal.

³⁶ *Ibid.*, hal. 199

³⁷ Riska Franita, "Analisa Pengangguran Di Indonesia", *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, Vol. 1, 2016, hal. 89. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 12.22

c. Lapangan pekerjaan yang kurang merata dan keterbatasan informasi

Tingginya *urbanisasi* di kota-kota besar menunjukkan bahwa kurang meratanya lapangan pekerjaan. Dimana, hal ini terjadi karena banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya lapangan pekerjaan di desa. Selain itu, informasi mengenai lowongan pekerjaan juga sulit untuk di akses. Terutama bagi mereka masyarakat pedesaan yang notabennya sebagian dari mereka kurang menguasai teknologi sehingga sulit untuk mencari informasi.³⁸

d. Pelatihan keterampilan yang belum maksimal

Selama ini, pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelatihan berupa keterampilan untuk menunjang para pencari kerja. Akan tetapi, upaya ini dirasa belum maksimal sehingga tidak dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

e. Budaya malas

Budaya malas yang masih banyak dimiliki oleh para angkatan kerja mengakibatkan mereka sulit mencari pekerjaan. Banyak dari mereka (angkatan kerja) yang mudah menyerah dan putus asa untuk mencari peluang. Sehingga menganggur menjadi pilihan bagi mereka.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hal. 90

³⁹ *Ibid.*, hal. 90

3. Jenis-jenis Pengangguran

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran normal atau *friksional* adalah keadaan dimana dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran 2%-4% dari jumlah seluruh angkatan kerja. Dalam hal ini, maka perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh (*full employment*). Ketika perekonomian suatu negara mengalami kemajuan, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan (rendah). Saat keadaan sedemikian rupa, maka perusahaan kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Untuk menarik minat pekerja, kemudian perusahaan akan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sehingga, orang akan tertarik meninggalkan pekerjaannya yang lama untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan minat atau keterampilan yang mereka miliki. Para pekerja yang sedang mencari pekerjaan baru ini bisa dikatakan pengangguran kategori normal atau *friksional*.⁴⁰

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran *siklikal* merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perkembangan perekonomian dalam suatu negara yang tidak stabil sebagai gelombang pertukaran naik

⁴⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hal. 199

turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang tidak pasti. Hal ini terjadi ketika permintaan lebih tinggi, maka produktivitas dalam suatu perusahaan semakin meningkat. Dengan begitu, perusahaan akan menambah pekerja. Disisi lain, ketika harga suatu komoditas utama sebagai bahan baku industri turun, secara tidak langsung permintaan akan suatu barang di pasaran juga menurun. Keadaan yang demikian mengakibatkan produksi akan suatu barang dalam perusahaan mengalami penurunan. Dengan begitu, perusahaan juga harus mengurangi karyawannya ataupun menutup usahanya. Saat itulah, para pekerja yang mengalami pengurangan karyawan tersebut menjadi pengangguran dan disebut sebagai pengangguran *siklikal*.⁴¹

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran *struktural* merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dari struktur kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan perusahaan atau industri yang mengalami kemunduran dalam perekonomian suatu negara. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya yaitu tidak mempunya suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Kemunduran itulah yang mengakibatkan produksi suatu barang dalam

⁴¹ *Ibid.*, hal 199-200

perusahaan menurun, sehingga sebagian dari pekerja mengalami putus hubungan kerja (PHK) yang kemudian menganggur.⁴²

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi, seperti tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin atau bahan kimia. Saat ini, dalam dunia industri sangat dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan banyak dari para pencari kerja mengalami PHK (putus hubungan kerja) karena tenaganya tidak diperlukan lagi dan diganti dengan teknologi yang semakin canggih ataupun bahan kimia (*pestisida*). Bahkan, banyak sekali negara-negara besar yang saat ini menggunakan robot untuk menggantikan tenaga manusia dalam industri berat maupun ringan.⁴³

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Ciri-cirinya

1) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terjadi karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat daripada jumlah lapangan atau lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga, hal ini menyebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dalam suatu negara semakin meningkat. Jadi, seseorang yang tidak ada pekerjaan sama sekali

⁴² *Ibid.*, hal 200

⁴³ *Ibid.*, hal 200-201

akan mengganggu secara sepenuh waktu dan nyata. Selain itu, lemahnya kegiatan perekonomian yang berakibat pada pengurangan karyawan juga dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran terbuka.

2) Pengangguran Tersembunyi (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran yang disebabkan karena penggunaan tenaga kerja dengan produktivitas rendah dengan harapan dapat menjalankan kegiatan secara efisien. Sehingga, pegawai dapat dipindahkan dari kegiatan aslinya tanpa mengurangi produksi. Pengangguran yang semacam ini mudah kita temui. Misalkan saja dalam dunia perkantoran, mereka mempekerjakan banyak sekali karyawan lebih dari kapasitas yang dibutuhkan. Sementara itu, pekerjaan yang harus dikerjakan sedikit. Sehingga, waktu yang digunakan untuk bekerja lebih singkat dan banyak waktu luang bagi para pekerja yang tidak bekerja, tentu saja hal ini menambah pengangguran.⁴⁴

3) Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya pengaruh musim. Dalam hal sebagai contohnya adalah nelayan. Apabila gelombang air laut sedang tinggi, maka nelayan tidak dapat melaut dalam kurun waktu tertentu. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan nelayan tersebut menganggur.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 201-202

4) Setengah Menganggur (*Underemployment*)

Setengah menganggur ini merupakan pengangguran yang terjadi pada para pekerja yang mempunyai masa kerja. Pengangguran ini salah satunya diakibatkan karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena sulitnya mencari pekerjaan, banyak dari mereka yang kemudian juga tidak bekerja dan menjadi penganggur sepenuh waktu. Dan sebagian dari mereka, mungkin ada pula yang bekerja akan tetapi setengah waktu atau lebih rendah dari waktu bekerja normal.⁴⁵

4. Dampak Pengangguran

Dalam bukunya Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, Sadono Sukirno berpendapat bahwa pengangguran memberikan dampak buruk yang dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu:

a. Akibat Buruk terhadap Kegiatan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi yang kuat mustahil untuk dicapai apabila tingkat pengangguran dalam suatu negara tersebut masih relatif tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dampak pengangguran terhadap ekonomi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimum. Dalam hal ini, pengangguran menyebabkan tingginya pendapatan potensial dari pada pendapatan nasional riil

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 202-203

masyarakat. Dengan begitu, tingkat kemakmuran masyarakat semakin rendah.

- 2) Berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi yang rendah mengakibatkan pengangguran, sehingga pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah juga semakin sedikit. Penerimaan pajak yang rendah akan mengakibatkan kegiatan seperti pembangunan juga terus menurun, hal ini dikarenakan dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah berkurang.
- 3) Pertumbuhan ekonomi terhenti. Pengangguran juga berakibat buruk terhadap kegiatan pada sektor swasta. Akibat buruk yang ditimbulkan yaitu pengangguran tenaga buruh yang diikuti oleh canggihnya kapasitas mesin yang dimiliki oleh perusahaan dan pengangguran yang terjadi karena lesunya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan menurunkan keinginannya untuk berinvestasi.⁴⁶

b. Akibat Buruk terhadap Individu dan Masyarakat

Adanya pengangguran akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan kestabilan sosial individu dalam masyarakat. Beberapa dampak buruk sosial yang diakibatkan karena pengangguran yaitu:

- 1) Hilangnya pendapatan dan mata pencaharian

⁴⁶ Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 27-28

- 2) Hilangnya keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang dimiliki setiap individu apabila terus digunakan maka akan semakin berkembang. Namun, apabila seseorang tidak mengerjakan suatu pekerjaan, maka keterampilan itu akan hilang. Karena keterampilan dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut dipraktekkan setiap saat.
- 3) Keadaan sosial dan politik yang tidak stabil. Dalam hal ini, rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Ini terjadi karena pengangguran yang tinggi dan lesunya kegiatan ekonomi.⁴⁷

5. Rumus Perhitungan Pengangguran

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan pada suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari besarnya tingkat pengangguran suatu negara tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran adalah sebagai berikut:⁴⁸

$$\text{Jumlah Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 28

⁴⁸ Seta Satria Utama, dkk, "Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Menggunakan Regresi Spline", *Jurnal Gaussian*, Vol. 4 No. 1, 2015, hal. 114. Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 08.05

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan nilai barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun. Dalam hal ini, penambahan nilai barang dan jasa tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengaruh antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pengangguran tersebut dapat dijelaskan dengan Hukum Okun. Dimana Hukum Okun ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Athur Okun, yang mana pertumbuhan ekonomi disini dikaitkan dengan GDP (*Gross Domestic Product*).

Hukum Okun menjelaskan bahwa pertumbuhan GDP memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Dengan asumsi apabila nilai GDP (*Gross Domestic Product*) tinggi, maka tingkat pengangguran rendah. Kemudian, apabila *Gross Domestic Product* tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, maka tingkat pengangguran akan berada pada tingkat yang sama atau tetap, bahkan akan mengalami kenaikan 1,5% dari periode sebelumnya.⁴⁹

b. Inflasi

Inflasi dengan pengangguran merupakan dua hal buruk yang selalu terjadi dalam setiap perekonomian. Dimana, setiap turunnya inflasi akan diikuti dengan meningkatnya angka pengangguran yang dituangkan dalam Indeks Kesengsaraan (*Misey Index*). Artinya, satu persen penurunan angka inflasi bisa dimentahkan oleh kenaikan

⁴⁹ Dahma Amar Ramdhan, dkk, "Faktor-Faktor...", hal. 4. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 09.45

inflasi sebesar satu persen. Dengan begitu, tidak ada perubahan yang akan dialami oleh masyarakat selama inflasi dan pengangguran saling mementahkan satu sama lain.

Kemudian pada dekade 1950-an, A.W. Philips melakukan penelitian hubungan antara tingkat upah, inflasi, dan pengangguran yang dikenal sebagai Kurva Philips. Dimana, dalam Kurva Philips menjelaskan bahwa adanya hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang negatif antara inflasi dengan pengangguran, yaitu apabila tingkat inflasi rendah maka tingkat pengangguran semakin tinggi dan sebaliknya.⁵⁰

Akan tetapi, perekonomian di Indonesia sendiri pada tahun 1984-2011 telah diamati bahwa kinerja perekonomian pada tahun tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh A.W. Philips. Dimana, pada masa itu kinerja perekonomian di Indonesia menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Hubungan positif tersebut terjadi karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1999, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mencapai -13% sehingga mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran.⁵¹

⁵⁰ M. Natsir, *Ekonomi Moneter...*, hal. 278-279

⁵¹ *Ibid.*, hal. 280-281

c. Pengeluaran Pemerintah

Dalam suatu negara, rencana pengeluaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah ditunjukkan oleh anggaran belanja. Anggaran belanja digunakan untuk merencanakan serta mengontrol keadaan fisik suatu negara.⁵² Salah satu pengeluaran yang dilakukan yaitu untuk belanja tenaga kerja.

Pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan pengangguran dijelaskan dalam Teori Keynes yang dikutip oleh Retno Wilis dalam Dumairy, bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dan pajak menurun, maka akan ada suatu suntikan yang masuk dalam pendapatan nasional sehingga permintaan agregat juga mengalami kenaikan dan memberikan efek yaitu lapangan pekerjaan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pengangguran, yaitu ketika pengeluaran pemerintah naik maka penyerapan tenaga kerja juga naik sehingga angka pengangguran turun.⁵³

d. Human Development Islamic Index (HDII)

Human Development Islamic Index (HDII) sama dengan *Human Development Index (HDI)* baik dari segi teori maupun

⁵² Rizaldi Kaharudin, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2001-2017)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 19 No 04, 2019, hal. 15. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 12.09

⁵³ Retno Wilis, "Analisis Pengaruh...", hal. 22. Diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 10.39

konsepnya, akan tetapi dalam HDII lebih disesuaikan berdasarkan perspektif Islam. Yang membedakannya yaitu indikator yang digunakan untuk menghitungnya. Dalam HDI perhitungan dilakukan melalui tiga pendekatan dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta kelayakan hidup.⁵⁴ Sedangkan dalam HDII dihitung dengan data yang menggambarkan lima dimensi *maqashid syariah*, yaitu *ad-dien* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (intelektual), *an-nasl* (keturunan) dan *al-maal* (harta).⁵⁵

Pengaruh *Human Development Islamic Index* (HDII) dengan pengangguran dalam hal ini dijelaskan berdasarkan teori *Human Development Index* (HDI). Dimana, dalam teori pertumbuhan baru dijelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia yang dilakukan dengan pembangunan *human capital* (modal manusia) mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. Sehingga, penyerapan terhadap tenaga kerja semakin banyak dan akan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, Hukum Okun juga menjelaskan bahwa meningkatnya *Human Development Index* akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dapat menyerap banyak tenaga kerja yang akan

⁵⁴ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks...", hal. 64. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 04.06

⁵⁵ Siti Rochmah dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Faktor...", hal. 820. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.35

berakibat pada menurunnya tingkat pengangguran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila *Human Development Index* ataupun *Human Development Islamic Index* naik, maka tingkat pengangguran turun.⁵⁶

e. Investasi

Sebagaimana dikutip oleh Dwi Mahroji, menurut Sadono Sukirno bahwa faktor yang dapat menurunkan tingkat pengangguran salah satunya yaitu investasi. Dengan kegiatan investasi akan memungkinkan masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerjanya dan peningkatan pada pendapatan nasional dan permintaan agregat secara terus menerus.⁵⁷

Dalam penciptaan lapangan pekerjaan, investasi memiliki peran yang penting, yaitu persediaan barang modal akan bertambah dengan adanya investasi. Dimana hal ini dijelaskan dalam Teori Harrod-Domar bahwa tidak hanya permintaan yang diciptakan karena investasi, akan tetapi juga kapasitas produksi yang meningkat. Dengan adanya peningkatan produksi maka kesempatan kerja tercipta dan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, sehingga tingkat pengangguran menurun.⁵⁸

⁵⁶ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks...", hal. 65. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 04.06

⁵⁷ *Ibid.*, hal 61-62

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 69

f. Upah Minimum

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran yaitu tingkat upah minimum. Dimana hal ini dijelaskan dalam teori Aturan Hick-Marshall. Teori tersebut menjelaskan apabila tingkat upah minimum mengalami peningkatan maka jumlah seluruh biaya produksi juga meningkat lebih tinggi. Sehingga, harga penjualan suatu produk akan mengalami peningkatan dan akan mengurangi jumlah permintaan akan suatu barang. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran.⁵⁹

Sejalan dengan teori di atas, sebagaimana yang dikutip oleh Dahma Amar Ramdhani, dkk, Ehrenberg dan Smith dalam bukunya Abdul Haris menjelaskan bahwa apabila tingkat upah rata-rata mengalami kenaikan, maka jumlah tenaga kerja yang diminta akan ikut mengalami penurunan. Dan sebaliknya, apabila tingkat upah rata-rata turun, maka kesempatan kerja meningkat.⁶⁰

B. Produk Domestik Bruto (PDB)

1. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah

⁵⁹ Retno Wilis, “ Analisis Pengaruh...”, hal. 20. Diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 10.39

⁶⁰ Dahma Amar Ramdhan, “Faktor-Faktor...”, hal. 5. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 09.45

perekonomian dalam satu periode atau kurun waktu tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut.⁶¹ Produk domestik bruto digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional. Dalam produk domestik bruto, seluruh hasil produksi dalam negeri terdapat di dalamnya.⁶²

Bisa dikatakan, produk domestik bruto digunakan untuk menghitung perolehan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ataupun warga asing yang dijalankan di negara yang bersangkutan. Salah satu barang-barang yang dihasilkan yaitu barang modal yang penyusutannya belum termasuk dalam hitungan, karena jumlah yang dihasilkan dari produk domestik bruto merupakan jumlah kotor.⁶³

Pendapat lain mengartikan sebagaimana yang dikutip oleh Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati, Latumaerissa menjelaskan lebih lengkap bahwa produk domestik bruto yaitu jumlah keseluruhan dari nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu (satu tahun), termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan milik warga dalam negeri maupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut.⁶⁴

⁶¹ Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro...*, hal. 10

⁶² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 174

⁶³ Dodi Arif, "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Indonesia Periode 2007-2013", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 19, No. 3, 2014, hal. 65. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.25

⁶⁴ Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati, "Pengaruh Inflasi, Ekspor, Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) : Study Pada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 63, No. 1, 2018, hal. 10. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.28

Disisi lain, produk domestik bruto digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tanpa melihat kewarganegaraan dalam kurun waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa seluruh warga negara yang bekerja di negara lain pendapatannya tidak dimasukkan dalam produk domestik bruto. Misalkan saja produk domestik bruto di Indonesia, yaitu baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, mereka tidak termasuk produk warga negara Indonesia di luar negeri.⁶⁵

2. Penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara tersebut bukan hanya dihasilkan oleh perusahaan warga negara yang bersangkutan melainkan juga diproduksi oleh warga negara asing. Hal tersebut berlaku baik dalam perekonomian negara maju maupun negara berkembang. Penggunaan produk domestik bruto untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan oleh semua negara, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia sendiri, produk domestik bruto didapatkan dari perhitungan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam negeri (Indonesia), baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 65-66

maupun warga negara asing.⁶⁶ Selain itu, dalam penggunaannya Produk Domestik Bruto (PDB) terdapat pengeluaran-pengeluaran, yaitu:

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah pengeluaran yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhannya selama satu tahun. Pengeluaran rumah tangga tersebut seperti, membeli pakaian, membeli makanan, membeli kendaraan, membayar sewa rumah, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran dalam bentuk konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah sendiri seperti pembelian alat tulis, pembayaran gaji guru, bahan bakar untuk transportasi pemerintahan dan lain sebagainya.

c. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta)

Investasi dalam hal ini merupakan pengeluaran yang digunakan sebagai belanja barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa untuk kepentingan di masa mendatang. Pembentukan modal tetap sektor swasta ini seperti merenovasi atau pembangunan gedung perkantoran, pembelian alat-alat produksi, mendirikan gedung untuk perindustrian dan lain-lain.⁶⁷

⁶⁶ Dodi Arif, Pengaruh Produk..., hal. 66. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.25

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 66

d. Ekspor Neto

Ekspor neto merupakan nilai ekspor dalam suatu negara dalam selama kurun waktu satu tahun dikurangi dengan nilai impornya dalam jangka waktu yang sama. Nilai seluruh atau sebagian dari Ekspor yang dilakukan suatu negara diperoleh dari hasil barang dan jasa dalam negeri.⁶⁸

3. Komponen Perhitungan dalam Produk Domestik Bruto

Berdasarkan penggunaan atau pengeluaran, Produk Domestik Bruto dikelompokkan menjadi beberapa komponen:

a. Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi seluruh pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi kebutuhan dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa dari aktivitas rumah tangga dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta penyusutan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak termasuk pemasukan dari produksi barang dan jasa.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 66

b. Pengeluaran Investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto)

Dalam hal ini, pengeluaran investasi meliputi produksi dan pembelian barang modal baru dan bekas baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

c. Perubahan Stok (*Inventory*)

Perubahan stok dalam hal ini merupakan perubahan nilai barang yang disimpan atau telah diproduksi di dalam negeri, akan tetapi belum dijual. Dalam Produk Domestik Bruto, perubahan stok inilah yang akan dihitung.

d. Ekspor Barang dan Jasa

Hasil ekspor yang dihitung dalam PDB merupakan nilai dari hasil penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh pihak luar negeri.

e. Impor Barang dan Jasa

Berbeda dengan ekspor, aktivitas impor barang dan jasa tidak memberikan nilai tambah dalam Produk Domestik Bruto. Dan dalam perhitungan PDB, yang dihitung yaitu seluruh pengeluaran dalam negeri terhadap barang impor baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan.⁶⁹

4. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)

Secara konsep, Perhitungan Produk Domestik Bruto menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 67

a. Pendekatan Produksi

Pada pendekatan produksi ini, Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produk, yaitu nilai jasa dan nilai barang jadi dari berbagai bidang seperti industri, *agraris*, jasa dan lain sebagainya.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini, Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan baik itu upah, sewa gaji maupun laba yang telah diterima oleh konsumsi rumah tangga dalam suatu negara.

c. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan Produk Domestik Bruto dengan pendekatan pengeluaran diperoleh dari menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk belanja barang dan jasa guna produksi suatu negara. Kegiatan ekonomi negara yang dihitung dalam pendekatan ini yaitu pemerintah, investasi, rumah tangga dan selisih ekspor dan impor.⁷⁰

⁷⁰ Lutvi Fauziana, dkk, “Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol 3 (2), 2014, hal. 375. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10.24

C. Tingkat Inflasi

1. Definisi Inflasi

Menurut M. Natsir:

“Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.”⁷¹

Dalam hal ini, terdapat barang maupun jasa yang harganya mengalami kenaikan dan ada pula barang dan jasa yang harganya mengalami penurunan. Akan tetapi, ada pula barang dan jasa yang harganya tetap.

Dalam bukunya M. Natsir, Nopirin berpendapat bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus, maka terjadinya inflasi bukan berarti harga barang dan jasa juga mengalami peningkatan dengan persentase yang sama.⁷²

Dengan demikian ada beberapa aspek yang perlu diketahui, yaitu inflasi terjadi ketika tingkat harga yang terjadi pada kurun waktu tertentu mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, akan tetapi cenderung mengalami peningkatan. Kemudian, apabila kenaikan harga hanya terjadi pada salah satu komoditi dan tidak mempengaruhi komoditi lain mengalami peningkatan harga, maka gejala tersebut tidak bisa dikatakan sebagai

⁷¹ M. Natsir, *Ekonomi Moneter...*, hal. 253

⁷² *Ibid.*, hal. 253-254

inflasi. Selain itu, kenaikan harga secara umum yang hanya terjadi sesaat juga tidak bisa dikatakan sebagai inflasi.⁷³

2. Penyebab Inflasi

a. *Demand Full Inflation* (Inflasi Karena Tarikan Permintaan)

Demand full inflation disebabkan karena adanya penambahan jumlah uang yang beredar. Dengan adanya penambahan jumlah uang yang beredar, maka dalam jangka pendek akan mengakibatkan jumlah permintaan agregat yang bertambah pula. Selain itu, pertumbuhan jumlah uang yang beredar juga akan menyebabkan suku bunga turun, sedangkan investasi dan konsumsi dalam masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, peningkatan permintaan agregat akan mendorong harga-harga mengalami kenaikan.

Inflasi karena adanya tarikan permintaan merupakan meningkatnya harga barang dan jasa yang muncul sebagai akibat dari adanya hubungan antara permintaan dan penawaran domestik jangka panjang.

M. Natsir dalam bukunya menjelaskan:

“Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan terjadi jika permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat.”⁷⁴

b. *Cost Push Inflation* (Inflasi Karena Dorongan Biaya)

Cost Push Inflation disebabkan karena adanya faktor penawaran dan kenaikan harga-harga. Salah satunya yaitu karena

⁷³ M. Natsir, *Ekonomi Moneter...*, hal. 254

⁷⁴ M. Natsir, *Ekonomi Moneter...*, hal. 255-258

adanya kenaikan biaya-biaya produksi maupun biaya karena adanya pengadaan terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, untuk mendapatkan keuntungan dan produksi tetap bisa berlanjut, maka produsen harus menaikkan harga.

Menurut M. Natsir:

Inflasi yang disebabkan oleh sisi permintaan dan sisi penawaran memiliki kesamaan yaitu menaikkan tingkat harga-harga secara umum (inflasi). Tetapi, kedua faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap volume *output* pada produk domestik bruto (PDB).

Dalam hal ini, inflasi yang disebabkan oleh permintaan akan turut meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Dan sebaliknya, inflasi yang disebabkan oleh penawaran cenderung diikuti penurunan produk domestik bruto (PDB).

c. *Expected Inflation* (Inflasi Karena Ekspektasi)

Tidak hanya permintaan dan penawaran yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, ekspektasi juga dapat mengakibatkan inflasi terjadi. Hal tersebut sering disebut sebagai ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi merupakan inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan perilaku masyarakat secara umum dari *backward* ke *forward looking*.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 258-261

3. Perhitungan Inflasi

Tingkat Inflasi di Indonesia di hitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan perubahan pada Indeks Harga Konsumen (IHK).

Untuk menghitung inflasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

INF_n = Inflasi ataupun deflasi pada periode (bulan atau tahun) ke-n

IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada periode (bulan atau tahun) ke-n

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen pada periode (bulan atau tahun) ke-(n-1)⁷⁶

4. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak yang sangat buruk bagi perekonomian dalam suatu negara. Dampak negatif yang dihasilkan dari terjadinya inflasi antara lain:

a. Adanya gangguan terhadap fungsi uang

Gangguan fungsi uang ini berpengaruh terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka serta fungsi uang dari unit perhitungan.

b. Keinginan dan sikap dari masyarakat untuk menabung lemah.

⁷⁶ Ibid., hal. 266

- c. Keinginan untuk melakukan konsumsi terhadap barang-barang non-primer dan barang-barang mewah tinggi.
- d. Investasi cenderung mengarah ke hal yang tidak produktif.⁷⁷
- e. Menurunnya tingkat kesejahteraan.
- f. Meningkatnya jumlah pengangguran dan lain-lain.

Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari inflasi yaitu memberikan keuntungan bagi debitur, yaitu nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Selain itu, inflasi juga memberikan keuntungan apabila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi⁷⁸

D. Pengeluaran Pemerintah

1. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan tindakan pemerintah dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Guritno Mangkoesobroto:

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁷⁹

M. Zahari MS, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan

⁷⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 139

⁷⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 178-181

⁷⁹ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik...*, hal. 169

fiskal yang berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya suatu perekonomian negara setiap tahun. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN).⁸⁰

Pengeluaran pemerintah secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Barang dan Jasa

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor⁸¹

Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan biaya untuk melaksanakan

⁸⁰ M. Zahari MS, "Pengaruh Pengeluaran...", hal. 187. Diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 11.53

⁸¹ Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang atau Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol 20 No 2, 2016, hal. 150. Diakses pada tanggal 13 November 2020 pukul 22.09

kebijakan atau fungsi dari pemerintah. Apabila kebijakan dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah banyak, maka anggaran biaya pengeluaran pemerintah juga semakin banyak.

2. Jenis-jenis Anggaran Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan tingkat pemerintahannya, anggaran pemerintah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Pusat

Anggaran pengeluaran pemerintah pusat ini ditetapkan guna untuk keperluan pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam suatu negara di bawah kewenangan presiden sebagai pemegang kuasa.

b. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah/Provinsi

Anggaran Pengeluaran pemerintah untuk daerah/provinsi ini merupakan anggaran yang direncanakan dan ditetapkan guna untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dalam tingkat daerah atau provinsi dan dialokasikan ke seluruh unit kegiatan kerja yang ada di daerah provinsi di bawah kewenangan gubernur. Unit kegiatan kerja dalam hal ini meliputi sekretariat daerah, dinas-dinas, lembaga atau badan daerah, dan lain sebagainya.

c. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota merupakan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan guna untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan yang dialokasikan ke seluruh unit kegiatan kerja yang ada di tingkat kabupaten atau kota, di bawah kewenangan bupati atau walikota.⁸²

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Pada teori ini menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam tahap awal perkembangan ekonomi, persentase pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah besar. Dikarenakan, pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap menengah pengeluaran pemerintah tetap digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam tahap ini peran dari swasta dalam melakukan investasi telah dalam tingkatan yang lebih besar. Sedangkan pada tahap lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lebih terfokus pada kegiatan sosial,

⁸² H. Effendie, *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal. 32-34

seperti program untuk kesejahteraan di masa tua, pelayanan untuk kesehatan masyarakat, dan lain-lain.⁸³

b. Hukum Wagner

Dalam teori ini Wagner menyatakan bahwa dalam *Gross National Product* (GNP) perkembangan pemerintah semakin besar. Akan tetapi pandangan Wagner ini tidak menjelaskan mengenai maksud dari perkembangan pengeluaran pemerintah dan *Gross National Product* termasuk dalam arti pertumbuhan secara relatif ataupun absolut. Apabila termasuk pertumbuhan yang relatif, maka hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Musgrave, yaitu apabila dalam perekonomian suatu negara pendapatan per kapitanya naik, maka secara relatif pengeluaran pemerintahnya pun akan ikut naik.⁸⁴

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman ini dianggap sebagai teori terbaik yang menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan teori ini didasarkan pada fakta yang terjadi dalam masyarakat, dimana masyarakat memiliki toleransi terhadap pajak. Artinya, dalam hal ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah selalu melakukan pengeluaran guna membiayai kegiatan pemerintahan sehingga mereka harus bersedia membayar pajak.

⁸³ Guritno Mngkoesebroto, *Ekonomi Publik...*, hal. 170-171

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 171-172

Inti dari teori Peacock Wiseman yaitu apabila dalam keadaan normal pemungutan pajak naik, maka penerimaan pemerintah terhadap pajak juga naik. Dengan demikian pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sedangkan, apabila terdapat gangguan yang menyebabkan keadaan tidak normal misalnya seperti adanya perang, maka pemerintah dalam hal ini akan melakukan pengalihan biaya yang awalnya untuk investasi dan konsumsi ke biaya untuk perang. Sehingga, pada teori Peacock dan Wiseman ini besarnya pengeluaran pemerintah berdasarkan pada besaran pajak yang diterima oleh pemerintah.⁸⁵

d. Teori Mikro

Teori mikro dalam perkembangan pengeluaran pemerintah menjelaskan hubungan antara permintaan dan penawaran. Dimana, permintaan dan penawaran akan menentukan banyaknya barang publik yang akan tersedia melalui anggaran belanja. Dalam teori mikro ini, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah, yaitu:

- 1) Perubahan yang terjadi karena permintaan akan barang publik.
- 2) Perubahan yang terjadi karena adanya aktivitas pemerintah dalam memproduksi dan gabungan faktor produksi yang digunakan dalam produksi suatu barang publik.
- 3) Kualitas barang publik yang selalu berubah.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 173-174

4) Harga faktor produksi yang tidak tetap.⁸⁶

E. Human Development Islamic Index (HDII)

1. Definisi *Human Development Islamic Index* (HDII)

Pembangunan ekonomi di negara yang mayoritas penduduknya muslim dirasa tidak tepat jika menggunakan indikator *Human Development Index* (HDI). Oleh karena itu, diciptakanlah model baru untuk mengukur pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, yaitu *Human Development Islamic Index* (HDII), dimana konsep dan teorinya sesuai dengan perspektif Islam. *Human Development Islamic Index* (HDII) merupakan alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur aspek penting yaitu perkembangan pembangunan manusia dalam perspektif Islam.⁸⁷ Tujuan dari HDII yaitu mengukur tingkat kesejahteraan manusia, baik kesejahteraan dalam bentuk materi maupun non materi berdasarkan pada lima dimensi *maqashid syari'ah* untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁸⁸

2. Konsep *Human Development Islamic Index* (HDII)

Definisi serta konsep pembangunan ekonomi mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Hal ini didasarkan pada definisi pembangunan yang telah berorientasi pada manusia. Tujuan utama suatu

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 177-178

⁸⁷ Siti Rochmah dan Raditya Sukmana, "Faktor-Faktor...", hal. 820. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.35

⁸⁸ Reni Mustika Putri dan Karjadi Mintaroem, "Determinan *Islamic*...", hal. 1412. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.49

pembangunan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan.⁸⁹ Untuk mengukur pencapaian pembangunan ekonomi suatu negara maka digunakanlah *Human Development Index* (HDI). Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan tidak hanya dilihat dari tingginya pendapatan, akan tetapi juga dilihat dari kualitas manusia sebagai fokus utamanya.⁹⁰ Dalam Islam terdapat empat filosofis dasar dalam suatu pembangunan, yaitu *Tauhid* (ke Esaan Allah Swt), *Rububbiyyah*, *Khilafah* dan *Tazkiyah*. Selain itu, ada empat gambaran umum mengenai konsep pembangunan dalam Islam, yaitu:

a. Bersifat komprehensif dan mengandung material, moral dan spiritual

Dalam hal ini, artinya pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan serta nilai. Dimana, segala aspek baik material, moral maupun spiritual yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kebahagiaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada dunia melainkan juga di akhirat.

b. Manusia sebagai pelaku utama pembangunan

Dalam Islam, manusia merupakan fokus utama pembangunan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai *khalifah* di bumi. Sehingga, Islam memperluas jangkauan yang dijadikan

⁸⁹ Maya Masita Septiarini dan Sri Herianingrum, "Analisis I-HDI...", hal. 383. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.01

⁹⁰ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 59

sebagai obyek pembangunan yang awalnya hanya berdasarkan pada lingkungan fisik menjadi kepada manusia.

c. Pembangunan ekonomi adalah kegiatan multidimensional

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan multidimensional memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus seimbang agar tidak terjadi suatu ketimpangan.

d. Pembangunan ekonomi melibatkan berbagai perubahan

Perubahan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi Islam berlaku baik secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* serta masing-masing memiliki keseimbangan.⁹¹

Sebagaimana dikutip oleh Maya Masita dan Sri Herianingrum, Imam al-Syatibi berpendapat bahwa kebutuhan (*masalahah*) dasar dalam kehidupan manusia terdiri dari lima hal, kebutuhan tersebut harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup yang dicapai tidak akan seimbang dan sempurna. Lima hal yang harus terpenuhi tersebut, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-maal*).⁹²

3. Metode Perhitungan *Human Development Islamic Index* (HDII)

Perhitungan *Human Development Islamic Index* (HDII) didasarkan pada indikator-indikator yang mewakili pemenuhan lima kebutuhan dasar menurut Imam al-Syatibi.

⁹¹ Maya Masita Septiarini dan Sri Herianingrum, "Analisis I-HDI...", hal. 383-384. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.01

⁹² *Ibid.*, hal. 385

Tabel 2.1
Indeks Maqashid Syari'ah

Tujuan	Dimensi	Indeks Dimensi
<i>Maslahah</i>	<i>Hifdzu ad-dien</i>	Indeks <i>ad-dien</i>
	<i>Hifdzu an-nafs</i>	Indeks <i>an-nafs</i>
	<i>Hifdzu al-'aql</i>	Indeks <i>al-'aql</i>
	<i>Hifdzu an-nasl</i>	Indeks <i>an-nasl</i>
	<i>Hifdzu al-maal</i>	Indeks <i>al-maal</i>

a. *Hifdzu ad-dien* (Agama)

Untuk mengukur dimensi *hifdzu ad-dien*, indikator yang dapat digunakan salah satunya adalah data angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan angka kriminalitas dianggap sebagai cerminan dari salah satu ibadah, yaitu shalat. Untuk menghitung tingkat kriminalitas, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000 \times 100\%$$

$$\text{ID} = \frac{\text{Nilai Kriminalitas} - \text{Nilai Kriminalitas Terendah}}{\text{Nilai Kriminalitas tertinggi} - \text{Nilai Kriminalitas Terendah}}$$

b. *Hifdzu an-nafs* (Jiwa)

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu an-nafs* adalah data angka harapan hidup. Indikator angka harapan hidup dianggap telah memenuhi dimensi *an-nafs*. Untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut:⁹³

$$\text{INF} = \frac{\text{Nilai Harapan Hidup} - \text{Nilai Harapan Hidup Terendah}}{\text{Nilai Harapan Hidup Tertinggi} - \text{Nilai Harapan Hidup Terendah}}$$

⁹³ Siti Rochmah dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Faktor...", hal. 821-822. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul. 10.35

c. *Hifdzu al-'aql* (Akal)

Dalam *hifdzu al-'aql*, indikator yang digunakan dalam perhitungannya diperoleh dari gabungan dua data, yaitu data angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:⁹⁴

$$IA = \frac{1}{2} (HLS) + \frac{1}{2} (RLS)$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

d. *Hifdzu an-nasl* (keturunan)

Hifdzu an-nasl dapat diukur menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk. Dimana, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk menandakan adanya penjagaan terhadap keturunan. Untuk menghitung indeks *an-nasl* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INS = \frac{\text{Laju Pertumbuhan Penduduk} - 0}{4 - 0}$$

e. *Hifdzu al-maal* (harta)

Hifdzu al-maal dapat dihitung dengan besarnya persentase penduduk miskin sebagai indikatornya. Dimana dalam hal ini, kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat

⁹⁴ Ria Safitri, dkk, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah", *IQTISHODUNA*, Vol. 16 (1), 2020, hal. 50. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 12.28

mencerminkan penjagaan terhadap harta. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks *al-maal* adalah sebagai berikut:⁹⁵

$$IM = \frac{\text{Presentase Penduduk Miskin} - 3}{40 - 3}$$

Setelah mengetahui nilai dari kelima indeks *maqashid syari'ah*, maka langkah terakhir yang digunakan untuk menghitung *Human Development Islamic Index* (HDII) yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:⁹⁶

$$HDII = \frac{2}{5} (ID) + \frac{1}{5} (INF + IA + INS + IM)$$

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu atau penelitian dari peneliti yang lainnya sebagai acuan penulis dalam penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arfan Poyoh, Gene H. M. Kapantow, dan Juliana R. Mandei yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, seperti upah, inflasi, dan pertumbuhan PDRB. Metode penelitian yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan

⁹⁵ Suharno, *Analisis Islamic Human Development Islamic Index (I-HDI) Indonesia (Analisis Simultan Data Panel 33 Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2010-2018)*, (Salatiga: Tesis Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 21

⁹⁶ Siti Rochmah dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Faktor...", hal. 821-822. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul. 10.35

variabel inflasi dan pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai seberapa jauh pengaruh variabel inflasi dan PDRB/PDB terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan perbedaannya, yaitu lingkup penelitian, tahun, dan jumlah variabel yang akan diteliti.⁹⁷

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih yang bertujuan menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu analisis deskriptif statistik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Kemudian, jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas seberapa jauh pengaruh inflasi terhadap pengangguran.

⁹⁷ Arfan Poyoh, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara", *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13 No. 1A, 2017, hal. 55. Diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 18.09

Sedangkan perbedaan terletak pada lingkup penelitian, waktu, jumlah variabel yang digunakan.⁹⁸

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Indra Suhendra dan Bayu Hadi Wicaksono yang bertujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menentukan pengaruh tingkat pendidikan, upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 2010-2012. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sarjana satu, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan SMA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian, secara simultan variabel-variabel *independen* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai seberapa jauh variabel inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan lingkup penelitian serta jumlah variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada rentang waktu yang digunakan.⁹⁹

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosalendro Eddy Nugroho yang bertujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

⁹⁸ Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember", *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. IV (1) 2017, hal. 117. Diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 18.11

⁹⁹ Indra Suhendra dan Bayu Hadi Wicaksono, "Tingkat Pendidikan...", hal. 2. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 03.55

pengangguran di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yaitu variabel yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan angka kemiskinan berpengaruh secara positif dan signifikan. Namun, jumlah probabilitas peluang kerja negatif dan signifikan. Sedangkan pendapatan atau upah nasional minimum tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai seberapa jauh pengaruh inflasi terhadap pengangguran dan lingkup penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu rentang waktu penelitian dan jumlah variabel yang digunakan.¹⁰⁰

Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Ravika Famala Sari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB, UMK, PMDN dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran

¹⁰⁰ Rosalendo Eddy Nugroho, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Indonesia Periode 1998-2014", *Jurnal PASTI*, Vol. X No. 2, hal. 177. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 03.59

serta jumlah variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu rentang waktu dan lingkup penelitian yang digunakan.¹⁰¹

Penelitian keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ataina Zulfa Nasution, Nurlaila, dan Zainul Fuad yang bertujuan untuk menguji pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode *kualitatif*, data bersumber dari data sekunder dengan *time series*. Dan analisis data menggunakan analisis *path*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi juga tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Lalu, secara simultan investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu membahas mengenai sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaannya yaitu jumlah variabel penelitian yang digunakan.¹⁰²

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Norman Luther Aruan dan D. Sriyono yang bertujuan untuk mengetahui dan

¹⁰¹ Nur Ravika Famala Sari, "Pengaruh Variabel...", hal. 1. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 04.00

¹⁰² Ataina Zulfa Nasution, Nurlaila, Zainul Fuad, "Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampak terhadap Pengangguran", *Jurnal Eknis*, Vol. 9 No. 1, 2020, hal. 253. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 04.01

menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum riil, inflasi dan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 terhadap pengangguran di Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *kuantitatif* dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan upah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di provinsi Yogyakarta. Persamaan penelitian tersebut yaitu membahas mengenai sejauh mana inflasi berpengaruh terhadap pengangguran dan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lingkup penelitian dan rentang waktu yang digunakan.¹⁰³

Penelitian kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dahma Amar Ramdhan, Djoko Setyadi, dan Adi Wijaya yang bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota (UMK), tingkat pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan tingkat pendidikan dan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai sejauh mana pengaruh inflasi terhadap pengangguran dan

¹⁰³ Norman Luther Aruan dan D. Sriyono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011", *MODUS*, Vol. 26 (2), 2014, hal. 173. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.32

jumlah variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu ruang lingkup, rentang waktu serta jumlah variabel *dependen* yang digunakan.¹⁰⁴

Penelitian kesembilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, dan Audie O. Niode yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Sederhana dengan model semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kemiskinan tidak berpengaruh. Secara simultan variabel tersebut dikategorikan masih rendah. Sedangkan dalam uji autokorelasi, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak memiliki masalah. Namun, pada kemiskinan terdapat masalah autokorelasi. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rentang waktu, jumlah variabel, dan lingkup penelitian yang digunakan.¹⁰⁵

Penelitian kesepuluh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochmah dan Raditya Sukmana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi terhadap *Islamic Human Development*

¹⁰⁴ Dahma Amar Ramdhan, dkk, "Faktor-Faktor...", hal. 1. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 09.45

¹⁰⁵ Rizaldi Kaharudin, dkk, "Pengaruh Pengeluaran...", hal. 13. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 12.09

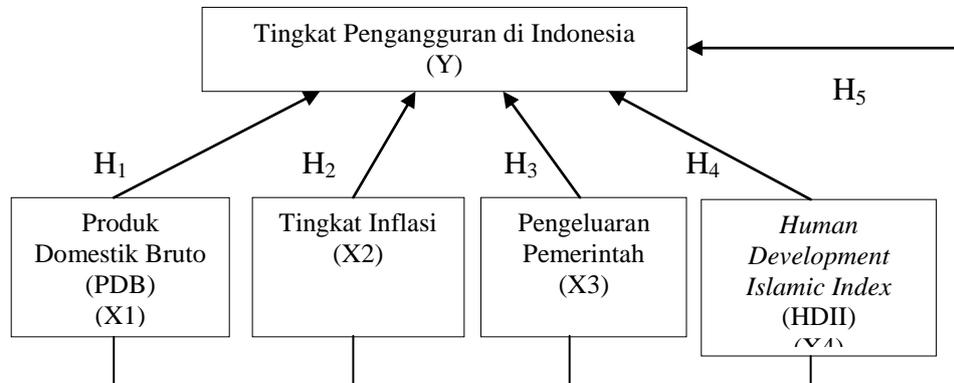
Index (IHDI). Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IHDI, sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap IHDI. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan rangking antara HDI dan IHDI. Persamaan penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai pengaruh variabel pengangguran terhadap IHDI ataupun sebaliknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada rentang waktu dan jumlah variabel yang digunakan.¹⁰⁶

G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji pengaruh produk domestik bruto (PDB), tingkat inflasi, pengeluaran pemerintah dan *Human Development Islamic Index* (HDII) terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian, peneliti membuat kerangka konseptual untuk dijadikan pedoman dalam menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁰⁶ Siti Rochmah dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Faktor...", hal. 819. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.35

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori di atas, dapat dirumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₁ = Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

H₂ = Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

H₃ = Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

H₄ = *Human Development Islamic Index* (HDII) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

H₅ = Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, pengeluaran pemerintah dan *Human Development Islamic Index* (HDII) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.